

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Karakter setiap pribadi individu manusia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lingkungan sosial masyarakat akan aman dan damai jika seluruh anggota masyarakatnya memiliki karakter positif. Demikian pula halnya jika seluruh pejabat negara dan aparat lainnya mempunyai karakter positif, maka negara akan lebih cepat maju. Seperti dikatakan oleh Megewangi (Kompas, 4 April 2019) bahwa karakter akan menentukan masa depan bangsa.

Karakter positif tidak terbentuk dengan sendirinya. Karakter harus ditanamkan dalam diri setiap orang. Penanaman karakter merupakan bagian penting dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, penanaman karakter harus dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dengan demikian, penanaman karakter menjadi tanggung jawab semua orang yang berhubungan dengan lingkungan perkembangan anak. Seperti dikatakan oleh Subianto (2013: 331) bahwa dalam membangun karakter yang baik, penanaman karakter harus dilakukan di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Penanaman karakter adalah langkah penting dalam membangun karakter bangsa.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Aliea Empat, disebutkan bahwa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cara mencerdaskan kehidupan bangsa ini dapat

dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan karakter positif. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) tentang membentuk pendidikan karakter yang sampai saat ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan.

UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No 20 Tahun 2003 Pasal 3, menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Kementerian Pendidikan Nasional melakukan kegiatan sarasehan dan penancangan program pendidikan budaya dan membangun karakter bangsa dalam usaha mengejawantahkan UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003, pada 14 Januari 2010 (Neolaka, 2019: 117). Kegiatan sarasehan dan penancangan program pendidikan budaya dan karakter ini merupakan gerakan nasional yang harus diterapkan di sekolah. Program pendidikan budaya dan karakter bangsa tersebut dilaksanakan melalui dua strategi, yaitu strategi dalam konteks makro yang berskala nasional dan konteks mikro yang berskala lokal.

Penanaman karakter yang dilaksanakan di sekolah lazimnya disebut pendidikan karakter, merupakan strategi dalam konteks mikro. Sekolah menjadi salah satu tempat sentral yang tepat untuk mempersiapkan generasi baru yang berintegritas yang tidak hanya diharapkan mempunyai kecerdasan intelektual, tetapi juga mempunyai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

Usaha pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang berkarakter positif, terus-menerus dilakukan. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 87 Tahun 2017 mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Tujuan PPK adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam pendidikan, dan merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat dan lingkungan keluarga. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara integrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Peserta didik yang menerima pendidikan karakter di sekolah, tidak semuanya akan memiliki karakter positif. Para ahli mengemukakan bahwa adanya perbedaan karakter peserta didik di setiap sekolah sebagai hasil dari pendidikan karakter di sekolah. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan manajerial kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan karakter di sekolah. Tua (2017:213) mengemukakan bahwa masih banyak kepala sekolah di Indonesia yang kurang mampu dalam menyelenggarakan manajemen sekolah di dalamnya termasuk

Manajemen Pendidikan Karakter (MPK). Kepala Sekolah yang kurang mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul di lingkungan sekolah, cenderung tidak membawa perubahan yang berarti. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kepala sekolah tidak memberanikan diri untuk membuat perubahan di sekolah. Sofro dkk (2012: 520) mengemukakan bahwa permasalahan dasar yang dialami oleh Kepala Sekolah adalah melakukan perubahan. Kepala Sekolah memiliki wewenang untuk mengatur sekolah sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003, gerakan nasional program pendidikan budaya dan karakter Tahun 2010 dan Perpres No 87 Tahun 2017 dalam praktik mengintegrasikan pendidikan karakter.

Praktik MPK merupakan usaha satuan pendidikan formal untuk menyiapkan peserta didik yang berkarakter baik. Praktik MPK melalui PPK yang telah dilaksanakan, tetapi tidak berjalan dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan MPK tidak berjalan dengan baik. Nuri dkk (2019:25) mengemukakan bahwa MPK dapat berhasil jika fungsi manajemen diterapkan dengan baik dan benar, sebab faktor penghambat dan pendukung praktik pendidikan karakter di setiap sekolah sangat berbeda tergantung pada visi dan misi yang diterapkan. Visi dan misi yang dikembangkan sesuai dengan tradisi dan budaya yang dijunjung tinggi oleh warga sekolah sehingga setiap sekolah mempunyai strategi masing-masing tergantung kemampuan manajerial kepala sekolah.

Ahmad (2015) juga menyampaikan hal yang sama. Studi MPK yang digagasnya adalah tentang strategi MPK yang harus dilakukan di Madrasah. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan karakter berjalan dengan baik dengan menerapkan fungsi manajemen *planning*,

*organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Planning* dilakukan oleh Kepala Sekolah Madrasah dengan melibatkan guru, masyarakat, orang tua, dan konselor dengan langkah menentukan nilai karakter, merancang kurikulum, merancang kondisi madrasah, ruang kelas, dan lingkungan luar. *Organizing* dilakukan memberikan tugas kepada guru, kepala madrasah, masyarakat, dan orang tua tentang pembagian beban kerja yang dapat dilakukan oleh semua komponen. *Actuating* dilaksanakan dengan mentransfer nilai-nilai kepada siswa dengan berbagai cara. *Controlling* dilakukan oleh Kepala Sekolah Madrasah sebagai penanggung jawab dan pemimpin tertinggi di madrasah. *Evaluating* dilakukan dengan cara membandingkan perilaku peserta didik dengan standar dan indikator yang dibuat, dan melakukan penilaian pencapaian.

Usaha pemerintah memperbaiki karakter peserta didik dan banyaknya budaya Indonesia yang membingkai, tidak membuat seluruh generasi muda atau peserta didik serta-merta berhenti melakukan penyimpangan. Remaja yang melakukan tindakan melanggar hukum, etika, dan moral yang kemudian menimbulkan kekhawatiran khalayak masyarakat dan berpotensi merusak masa depan pribadi, sampai saat ini masih sangat marak. Tabel 1.1 berikut ini disajikan data pengguna narkoba yang tercatat pada laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN).

**Tabel 1.1**

**Data BNN Pengguna Narkoba di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
2017	10-59	3.376.115
2018	Pelajar	2.290.000

*Sumber: Laman Daring BNN(2019) diunduh pada 16 Agustus 2019*

Tabel 1.1 di atas menggambarkan tentang keadaan generasi penerus yang menggunakan narkoba. BNN mencatat pada tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun menggunakan narkoba dan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 2,29 juta pelajar yang menggunakan narkoba.

UNICEF juga mencatat bahwa pada tahun 2016 sebanyak 50% remaja di Indonesia melakukan kekerasan terhadap sesama remaja (Iro, 2018). Dengan demikian setengah dari jumlah remaja di Indonesia pernah melakukan kekerasan terhadap teman sebaya. Pertanyaan refleksi yang dapat disampaikan adalah keadaan remaja Indonesia yang seperti sekarang ini, mampukah menjadi generasi emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Perpres No 87 Tahun 2017? Mampukah generasi muda yang disebut sebagai generasi penerus bangsa melanjutkan kepemimpinan tongkat estafet negara tercinta ini?

Keadaan karakter remaja Indonesia telah mengalami degradasi nilai-nilai luhur. Kejahatan dan kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak boleh dipandang ringan. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja, seperti mencoret-coret baju saat pengumuman kelulusan, bolos sekolah, tawuran, membangkang orang tua dan guru, terlambat ke sekolah, memukul teman dan guru, dan melompat pagar sangat memprihatinkan.

Kejahatan serius juga telah dilakukan oleh oknum remaja, seperti pelecehan seksual, pembunuhan dan pencurian. Kenakalan dan kejahatan tersebut di atas, membuat media cetak, media elektronik, dan media sosial setiap harinya pasti memuat berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh oknum remaja. Tabel 1.2 disajikan berita tentang kenakalan remaja sebagai berikut.

**Tabel 1.2**

**Data Berita Harian Kompas tentang Kenakalan dan Kejahatan**

<b>Tanggal</b>	<b>Kenakalan dan kejahatan yang dilakukan</b>
14 Maret 2019	Polisi menangkap 122 remaja di Jakarta yang terlibat kejahatan jalanan
21 September 2019	Menahan 71 Siswa SMK Wilayah Bogor yang melakukan bolos masak
16 Januari 2020	Tawuran antarpemuda menyebabkan dua orang remaja tewas di Cirebon
29 April 2020	Terjadi tawuran yang menyebabkan 3 orang meninggal di Tangerang

*Sumber: Berita Harian Kompas pada 29 Juli 2019*

Tabel 2.1 di atas adalah sari berita yang dipublikasikan oleh Kompas tentang kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja dan data jumlah penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Tabel 1.3 berikut ini disajikan data penghuni LPKA di Indonesia.

**Tabel 1.3**

**Data Jumlah Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

<b>Tahun</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Presentase (%) Kenaikan LPKA NTT</b>
2016	2.835	26	0,91
2017	2.835	49	1,72
2018	2.933	59	2,01
2019	2.026	74	3,65

*Sumber: Data base Permasalahan yang diunduh pada 16 Agustus 2020*

Tabel 1.3 di atas adalah data jumlah penghuni LPKA Kanwil Indonesia dan Kanwil LPKA NTT yang setiap tahun cenderung meningkat. Tahun 2016 LPKA menampung 26 anak dan pada Tahun 2019 telah mencapai 74 orang. Angka ini meningkat kurang lebih tiga kali lipat. Para remaja yang merupakan pelaku tindakan kejahatan ini dimasukkan di LPKA untuk dibina agar dapat menjadi remaja yang baik setelah keluar dari lembaga pembinaan.

Harian Media Indonesia (28 Juni 2019) memublikasikan hasil survei yang dilakukan oleh *Plan* Indonesia bahwa sebanyak 29,50 % remaja dari 61% remaja NTT yang sedang berpacaran mengalami kekerasan seksual. Remaja-remaja yang pernah menjadi korban kekerasan seksual ini tentu saja sangat berpotensi mengalami trauma psikologis. Peserta didik yang memiliki trauma psikologis ini, akan mengalami banyak masalah dengan keluarga, masyarakat dan di lingkungan sekolah. Data masalah kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian remaja NTT tersebut mencerminkan rendahnya kadar karakter positif.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sebagian remaja melakukan kenakalan dan kejahatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah peraturan sekolah yang longgar. Lingkungan sekolah memberikan peluang kepada peserta didik melakukan kesalahan seperti membiarkan peserta didik membawa *HP* ke sekolah, membolos, berpacaran, dan lain-lain. Silvia (2018: 161) menjelaskan faktor penghambat dalam membudayakan nilai di sekolah adalah adanya kebiasaan peserta didik bermain *gedged*. Selain itu, peserta didik juga sangat mudah terpengaruh oleh *trend* yang bersifat negatif dan bentuk-bentuk publikasi di media sosial yang dapat merusak moral peserta didik.

Sebagian guru di sekolah juga menganggap bahwa pendidikan karakter merupakan tanggung jawab guru konselor dan guru mata pelajaran agama. Guru yang beranggapan demikian jelas keliru karena kurikulum 2013 dirancang berbasis kompetensi dan karakter. Anggapan yang demikian jelas salah karena seperti yang dikatakan oleh Mastur (2017:51) bahwa tema pembaharuan dan perbaikan pada Kurikulum 2013 adalah ingin menciptakan manusia Indonesia



yang mampu berpikir kreatif, produktif, inovatif, proaktif, dan afektif, melalui pengembangan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu tentang apa) secara integratif. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, namun kreatif dan sarat nilai.

Jalur pendidikan formal pada dasarnya menerapkan ranah afektif, kognitif dan psikomotorik sebagai evaluasi hasil belajar. Bloom dalam Rusmono (2014:22) mengemukakan bahwa, peserta didik yang menempuh jalur pendidikan formal diharapkan memiliki perubahan perilaku dalam tiga ranah yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik. Ranah afektif berkaitan dengan perubahan sikap peserta didik, ranah kognitif berkaitan dengan aspek pengetahuan dan ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan peserta didik. Empat aspek penilaian dalam kurikulum 2013 juga mencakup 4 aspek yaitu aspek religi dan aspek sosial merupakan ranah afektif, aspek pengetahuan merupakan ranah kognitif dan aspek keterampilan merupakan ranah psikomotorik.

Aspek religi dan aspek sosial merupakan bagian dari pendidikan karakter yang harus diterapkan di jalur pendidikan dan jenjang pendidikan manapun. Pendidikan karakter telah dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia, termasuk di SMA Negeri 5 Kupang (SMAN 5) dan SMA Santo Rafael Kupang. Kedua sekolah ini berlokasi di Jalan Thamrin Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dua lokasi sekolah ini berdekatan dan hanya dipisahkan oleh jalan raya.

SMA Negeri 5 Kupang adalah salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), yang sebagian peserta didiknya telah melakukan kenakalan mulai dari

yang kadarnya ringan sampai dengan berat. Beberapa contoh kenakalan peserta didik SMAN 5 yang termasuk dalam kategori berat adalah tawuran, mencuri, dan berkelahi dengan sesama teman. Hasil wawancara pada saat pengambilan data awal mengindikasikan bahwa kondisi SMAN 5 pada tahun 2016 sangat memprihatinkan. Peserta didik SMAN 5 pada umumnya tidak bersedia bekerja sama, baik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. SMAN 5 juga menjadi alternatif terakhir, tempat berpindah sekolah bagi peserta didik bermasalah dari sekolah negeri yang lain. SMAN 5 telah banyak mengalami perubahan pada akhir tahun 2019. Perilaku para peserta didiknya relatif lebih baik dari sebelumnya. Pendapat tersebut merupakan hasil wawancara dengan para guru, bahwa perubahan ini terjadi setelah ada pergantian pucuk pimpinan Kepala Sekolah yang membuat Buku Tata Tertib Peserta didik.

SMA Santo Rafael Kupang adalah sekolah swasta bagi para calon Imam, berasrama, dan dikelola oleh Yayasan Swastisari Kupang. Sebagian besar gurunya adalah para Pastor atau Imam Katolik (Staf seminari). Peserta didik sering melakukan kenakalan ringan, seperti tidur di kelas, terlambat mengumpulkan tugas, dan berkonflik dengan teman.

Hasil wawancara awal dengan Kepala Sekolah dan guru SMA Santo Rafael menunjukkan bahwa praktik MPK telah berjalan. MPK yang diterapkan telah terstruktur dengan baik, dari perencanaan sampai evaluasi yang tertuang dalam bentuk Panduan Umum. Kepala Sekolah dan guru sudah mempraktikkan MPK sesuai dengan Panduan Umum. Panduan Umum mengatur peserta didik sejak masuk ke dalam lingkungan sekolah hingga keluar sekolah. Panduan Umum berisi

perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang harus dijalankan selama satu semester. Panduan Umum ini telah dibuat oleh para Imam dan diperbaharui setiap semester sesuai dengan hasil rapat bersama.

Peserta didik yang ada di SMA St. Rafael diasramakan. Semua peserta didik wajib untuk tinggal dalam lingkungan asrama dan mematuhi semua aturan asrama. Asrama dikelola oleh para Imam Katolik yang merupakan Guru di SMA St. Rafael. Ketertiban peserta didik di asrama dan di sekolah dalam mematuhi peraturan menjadi bahan pertimbangan guru untuk mempertahankan peserta didik untuk tetap belajar. Peserta didik yang tidak mematuhi peraturan asrama dan peraturan sekolah akan dikeluarkan. Peserta didik yang melakukan pelanggaran di sekolah dengan batas maksimal akan dikeluarkan. Demikian pula peserta didik yang melakukan pelanggaran di asrama. Data SMA St. Rafael, Tahun 2019 telah memindahkan 4 orang dan pada Tahun 2020 pihak sekolah kembali memindahkan 1 orang siswa karena melanggar peraturan di lingkungan asrama dan lingkungan sekolah.

Hasil wawancara awal menemukan bahwa ada perbedaan MPK yang diterapkan di SMAN 5 dan di SMA St. Rafael. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, disampaikan bahwa praktik pendidikan karakter telah berjalan, namun belum maksimal. Saat ini praktik MPK telah berjalan baik dibandingkan pada tahun 2016, pada saat itu karakter peserta didik sangat memprihatinkan. Contohnya adalah peserta didik tidak memiliki rasa segan terhadap guru, dengan berkelahi di depan guru tanpa takut; namun pada saat ini peserta didik sudah lebih segan kepada guru karena Kepala Sekolah sangat tegas.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa adalah tidak belajar, membangkang kepada guru, melompat pagar, bolos, dan pernah terjadi pelecehan seksual terhadap siswi oleh seorang siswa.

Peserta didik di SMA 5 memiliki buku Tata Tertib Siswa yang berisi butir-butir pelanggaran. Peserta didik harus membawa buku ini setiap hari saat ke sekolah, untuk mencatat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Peserta didik yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan poin lebih 100 poin maka akan dikembalikan kepada orang tua. Ada tahap-tahap yang harus dilewati sebelum dikembalikan kepada orang tua, seperti teguran lisan dan surat panggilan kepada orang tua. Data SMA 5, tercatat Tahun 2019 sebanyak 16 orang peserta yang dikembalikan kepada orang dan pada Tahun 2020 mengembalikan sebanyak 9 orang peserta didik tua karena pelanggaran mencapai lebih dari 100 poin. Tabel 1.4 disajikan data siswa yang dikeluarkan dari SMA St. Rafael dan di SMAN 5.

**Tabel 1.4**

**Data Siswa yang Dikeluarkan**

<b>Tahun</b>	<b>SMA St Rafael</b>	<b>SMA 5</b>
2019	4	16
2020	1	9

*Sumber: Hasil Wawancara*

Tabel 1.4 di atas menunjukkan data siswa yang dikeluarkan. Siswa SMA 5 yang dikeluarkan dengan menggunakan istilah dipulangkan kepada orang tua. Siswa yang dikeluarkan merupakan siswa yang melakukan pelanggaran mencapai ambang batas poin dalam buku Tata Tertib. Siswa St Rafael yang dikeluarkan karena dua hal. *Pertama*, melakukan pelanggaran di sekolah dan di asrama.

*Kedua*, tidak mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan.

Karakter yang baik harus dibangun dan dibina di sekolah sehingga banyak pemerhati pendidikan karakter yang melakukan penelitian. Penelitian praktik MPK pada umumnya dilakukan di sekolah swasta, baik yang berafiliasi pada Agama Islam maupun Agama Katolik. Rimawan (2014) melakukan penelitian MPK di SMA De Britto Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik manajemen pendidikan karakter yang diterapkan adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol atau pengawasan dan evaluasi.

Perencanaan pendidikan karakter dibuat dalam bentuk panduan umum. Pengorganisasian melalui kegiatan ekskursi untuk siswa kelas X, *live in* untuk siswa kelas X, dan *ret-ret* untuk kelas XII. Pelaksanaan pendidikan karakter melalui aktivitas sehari-hari, keteladanan, ekstrakurikuler, ibadah rohani, perwalian, presidium siswa, pembinaan rohani, pelatihan kepemimpinan, tata tertib siswa, pendidikan nilai dan bimbingan konseling. Pengawasan yang diterapkan di SMA De Britto adalah seorang pejabat pamong siswa sebagai penanggung jawab Pendidikan karakter. Evaluasi pada SMA ini adalah *ret-ret* atau *geladi rohani* sebagai media ++untuk mengevaluasi diri dan pengokohan jati diri.

Nailul (2017) melakukan penelitian MPK di MAN 1 Berebes dan MAN 2 Berebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik MPK yang dijalankan adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, kebudayaan dan

pembiasaan yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Semua warga bergotong royong untuk menjalankan MPK di lingkungan sekolah. MPK juga dilaksanakan di lingkungan keluarga dan lingkungan bermain peserta didik.

Penelitian tentang praktik MPK yang dilakukan oleh Rimawan (2014) dan Nailul (2017) telah memiliki perbedaan. *Pertama*, hasil penelitian Rimawan (2014) menunjukkan bahwa MPK yang dipraktikkan di sekolah adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol atau pengawasan dan evaluasi. Sementara Nailul (2017) menemukan praktik MPK yang dijalankan di sekolah adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Rimawan (2014) menemukan 5 fungsi MPK yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol atau pengawasan, dan evaluasi. Nailul (2017) menemukan 4 MPK yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. *Kedua*, praktik MPK yang dijalankan antara dua peneliti juga berbeda. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi pada penelitian Rimawan (2014), dilakukan dalam kegiatan yang berbeda-beda. Sedangkan Nailul (2017) menemukan bahwa kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terintegrasi dalam tiga kegiatan yaitu pembelajaran, ekstrakurikuler, pembudayaan dan pembiasaan. *Ketiga*, Penelitian Rimawan (2014) ditemukan bahwa MPK dilaksanakan oleh siswa, sedangkan Nailul (2017) menemukan bahwa praktik MPK dilakukan oleh semua warga sekolah.

Berdasarkan penelusuran publikasi jurnal ilmiah nasional juga ditemukan penelitian tentang praktik MPK kebanyakan dilaksanakan pada sekolah swasta.

Penelitian ini berusaha menelaah tentang praktik MPK yang dilakukan sekolah Katolik dan sekolah negeri sebab pendidikan karakter seyogyanya dilakukan di semua sekolah.

Bertolak dari adanya perbedaan yang sangat menyolok antara karakter peserta didik SMA Negeri 5 Kupang dan SMA Seminari St. Rafael Kupang yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadinya fenomena degradasi nilai moral di kalangan sebagian generasi muda, dan hasil penelitian praktik MPK yang berbeda, maka dibuat penelitian berjudul “Manajemen Pendidikan Karakter di SMA Seminari St. Rafael Kupang dan SMA Negeri 5 Kupang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana MPK SMA Negeri 5 Kupang dan SMA Seminari St. Rafael Kupang?
2. Apa kelebihan dan kekurangan MPK SMA Negeri 5 Kupang dan SMA Seminari St. Rafael Kupang?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung MPK SMA Seminari St. Rafael dan SMAN 5 Kupang?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyintesis praktik MPK SMA Negeri 5 Kupang dan SMA Seminari St. Rafael Kupang.

2. Menyintesis kelebihan dan kekurangan MPK di SMA Negeri 5 Kupang dan SMA Seminari St. Rafael Kupang.
3. Menelaah faktor penghambat dan pendukung MPK di SMA Negeri 5 Kupang dan SMA Seminari St. Rafael Kupang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah teoretik dalam bidang Manajemen Pendidikan Karakter.
2. Memberikan kontribusi positif kepada guru-guru SMA Negeri 5 Kupang dan SMA Seminari St. Rafael untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembudayaan dan pembiasaan.
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan.
4. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi semua pihak dalam menelaah ilmu manajemen pendidikan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi almamater: hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan Magister Manajemen khususnya konsentrasi manajemen pendidikan.
2. Bagi mahasiswa Program Magister Manajemen: hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam mengadakan penelitian sejenis.



3. Bagi guru: hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengejawantahkan pendidikan karakter kepada siswa.
4. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam praktik MPK positif di sekolah.